

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian tesis ini yang berisi mengenai simpulan yang dikemukakan oleh penerliti sebagai analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikaji dan ditelaah pada bab IV. Selain berupa simpulan, dalam bab ini juga peneliti menulis mengenai implikasi dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti mengenai hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari penelitian dengan judul Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Nawacita Dalam Meningkatkan *Good Governance* (Studi Deskriptif Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur).

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Penelitian ini menggambarkan tentang studi deskriptif Bagaimana Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Nawacita Oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur Pada Periode 2014-2019 Dalam Meningkatkan *Good Governance*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik simpulan secara umum bahwasannya implementasi program nawacita di daerah Cianjur berjalan sangat cukup baik.

Program-program dari pemerintah pusat yang memang di peruntukan untuk daerah sudah sampai kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, kemudian dari pemerintah daerah diberikan kepada langsung kepada masyarakat. Akan tetapi dari bantuan pemerintah daerah ke masyarakat ini yang kemudian masih belum tepat sasaran masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari program nawacita tersebut.

##### **5.1.2. Simpulan Khusus**

Adapun simpulan khusus dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 5.1.2.1 Pelaksanaan program Nawacita oleh Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur selalu menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya ada program Nawacita sebagai acuan atau patokan dalam menyusun sebuah pelaksanaan tata kelola pemerinrahan yang baik. Selanjutnya program-program yang terdapat dalam RPJMN tersebut dituangkan kembali dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kabupaten Cianjur berdasarkan masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Cianjur.

5.1.2.2 Realisasi program Nawacita untuk masyarakat daerah Kabupaten Cianjur. Realisasi program Nawacita Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan program Nawacita tersebut antara lain: Turut menjaga stabilitas keamanan dalam politik, ekonomi, dan social; Perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri; Mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan prinsip *good government* dan *clean governens*; Membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Progran Indonesia Pintar (PIP); Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

5.1.2.3 Nilai-nilai program Nawacita dalam meningkatkan *Good Governance*.

Ada kesesuaian nilai antara program Nawacita dengan Visi Misi Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam berbagai program untuk terealisasinya visi Cianjur lebih maju dan agamis, serta misi Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, meningkatkan pembangunan keagamaan, serta meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

## 5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini membawa implikasi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan program nawacita dalam meningkatkan *good governance* akan memberikan implikasi kepada *stackholder* pemerintah daerah Cianjur untuk selalu tanggap dan cepat terhadap program yang diberikan oleh pemerintah pusat.

5.2.2 Dengan hasil penelitian ini berimplikasi pada aspek sinergitas atau kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan, organisasi kepemudaan, sektor swasta, dan masyarakat. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kerjasama dan partisipasi publik adalah hal yang utama.

5.2.3 Penelitian ini memberikan implikasi terhadap sikap keteladanan dalam kepemimpinan agar dapat bekerjasama sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, serta menjunjung tinggi Norma kesusilaan, kepatuhan, dan Norma hukum, untuk mewujudkan

Sena Aji Purnama, 2021

*Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Nawacita Dalam Meningkatkan Good Governance*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip dan azas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **5.3 Rekomendasi**

Setelah mengkaji berbagai permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki pemahaman dan penilaian. Adapun saran/rekomendasi yang dapat peneliti berikan diantaranya:

#### **5.3.1. Untuk Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

- a. Memberi pemahaman wawasan kebijakan publik dan wawasan politik terhadap mahasiswa yang kelak menjadi pejabat publik untuk menitik beratkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- b. Mendorong upaya meningkatkan partisipasi politik pemuda sejak dini dengan memasukan materi kebijakan publik kedalam kurikulum pendidikan bukan hanya menjadi sisipan mata pelajaran PKn.

#### **5.3.2 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur**

##### **5.3.2.1 Bagi Eksekutif**

- a. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus lebih sensitif dan empati terhadap kepentingan rakyat. Setiap kebijakan yang diusung oleh pemerintah harus selalu tanggap dan cepat untuk diorientasikan dalam setiap menyelesaikan problem masyarakat Cianjur agar tepat sasaran.
- b. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus lebih meningkatkan sinergitas atau kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan, organisasi kepemudaan, sektor swasta, dan masyarakat. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kerjasama dan partisipasi publik adalah hal yang utama.
- c. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus harus senantiasa meningkatkan sikap keteladanan dalam kepemimpinan agar dapat bekerjasama sesuai dengan ruang lingkungnya masing-masing.
- d. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus senantiasa menjunjung tinggi Norma kesusilaan, kepatuhan, dan Norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip dan azas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

##### **5.3.2.2 Bagi Legislatif**

Sebagaimana fungsinya dewan perwakilan rakyat daerah yang membuat peraturan daerah kabupaten bersama bupati/wakil bupati, membahas serta memberikan persetujuan terkait rencana APBD, kemudian melakukan pengawasan terhadap peraturan dan APBD agar guna tepat sasaran terhadap masyarakat.

#### 5.3.2.3 Bagi Masyarakat

Masyarakat senantiasa harus selalu bisa memberikan kritik terhadap pemerintah daerah serta memberikan solusi agar saling *checks and balances* kemudian berjalannya pemerintahan yang baik demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

### 5.3.3 Pemerintah Republik Indonesia

- a. Pemerintah Pusat harus lebih meningkatkan sosialisasi dan komunikasi serta sinergitas atau kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten dan berbagai lembaga pemerintahan, organisasi kepemudaan, sektor swasta, dan masyarakat. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kerjasama dan partisipasi publik adalah hal yang utama.
- b. Pemerintah Pusat harus selalu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip dan azas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 5.3.4 Untuk Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, senantiasa selalu mencari informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha meningkatkan wawasan serta pengetahuan, terutama dalam konteks Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam meningkatkan *Good Governance*.